

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori

2.1.1. Konsep Administrasi Pembangunan

Secara harfiah, partisipasi berasal dari bahasa Inggris *participation* yang berarti peran serta. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangatlah penting dan diletakkan atas dasar keyakinan bahwa masyarakatlah yang paling tahu dan paling mengerti apa yang mereka butuhkan dan apa permasalahan yang mereka hadapi. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Partisipasi menurut Soekanto (dalam Ngusmanto 2015:132) merupakan suatu aktivitas untuk mengambil bagian atau peran dalam suatu kegiatan bersama. Pemahaman makna partisipasi berikutnya sebagaimana diungkapkan oleh Davis (dalam Ngusmanto 2015:132) menegaskan bahwa partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental, pikiran, emosi atau perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Selanjutnya Tjokrowinoto (1993:48) menegaskan bahwa partisipasi secara aktif dalam pembangunan lingkungan masyarakat pedesaan sangat dibutuhkan bahkan sudah menjadi mitos dari pembangunan itu sendiri, sehingga hampir semua negara mengumumkan secara luas kebutuhan partisipasi dalam semua proses pembangunan.

Mikkelsen (dalam Soetomo, 2013:438) menginvestasikan enam makna

tentang partisipasi, yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
2. Partisipasi adalah usaha membuat masyarakat semangkin peka dalam meningkatkan kemampuan menerima dan kemampuan menanggapi proyek-proyek pembangunan.
3. Partisipasi adalah proses aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebiasaannya untuk melakukan hal itu.
4. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf dalam melakukan persiapan, pelaksanaan, dan monitoring proyek, agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial.
5. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan.

Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan wewenag yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara bersama-sama memecahkan berbagai persoalan. Pembagian kewenangan ini dilakukan berdasarkan tingkat keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan tersebut. Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mencari solusi permasalahan yang lebih baik dalam suatu komunitas dengan membuka lebih banyak kesempatan bagi

masyarakat untuk ikut memberikan kontribusi sehingga implementasi kegiatan berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Pada mulanya istilah ini dipopulerkan oleh sarjana dan para pembuat kebijakan di Amerika Serikat kemudian segera di perkenalkan ke Eropa dan negara-negara berkembang di seluruh dunia kemudian istilah pembangunan menjadi suatu isu utama di organisasi-organisasi internasional meskipun belum ada suatu rumusan yang dipahami secara universal.

Beberapa definisi berikut ini kiranya dapat memberikan gambaran umum tentang pembangunan.

Pembangunan adalah:

1. Perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai control yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya dan yang memungkinkan warganya memperoleh control yang lebih terhadap diri mereka sendiri. (Inayatullah 1967)
2. Suatu jenis perubahan sosial di mana ide-ide Baru diperkenalkan kepada suatu sistem sosial untuk menghasilkan pendapatan perkapita dan tingkat kehidupan yang lebih tinggi melalui metode produksi yang lebih modern dan organisasi sosial yang lebih baik. pembangunan adalah modernisasi pada tingkat sistem sosial. (Rogers dan Shoemaker, 1971) Pada akhirnya bukanlah soal teknologi atau GNP, tetapi pencapaian pengetahuan dan keterampilan baru, tumbuhnya suatu kesadaran baru, perluasan wawasan

manusia, meningkatnya semangat kemanusiaan dan suntikan kepercayaan diri (Kleinjans, 1975)

3. Suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui control yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan (Rogers, 1983)

Tujuan umum pembangunan adalah proyeksi terjauh dari harapan-harapan dan ide-ide manusia komponen-komponen dari yang terbaik yang mungkin atau masyarakat ideal terbaik yang dapat dibayangkan. Menurut Siagan (dalam Afiffuddin, 2010:5) mengatakan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dalam pelaksanaan yang pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pembangunan adalah suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Siagan, 2005).

Administrasi Pembangunan mencakup dua pengertian, administrasi dan pembangunan. Administrasi ialah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara

terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara untuk menuju modernitas dalam rangka pebinaan bangsa (*nation-building*).

Menurut Siagan (2005:5), Administrasi Pembangunan yaitu usaha yang dilakukan oleh suatu negara atau bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan. Sedangkan menurut Tjokroamidjojo (1995:13) administrasi pembangunan diartikan sebagai proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara (pemerintah) untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan adalah sebuah proses yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat pada sebuah negara secara sadar dan terencana untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik (modern).

2.1.2 Konsep Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dapat diartikan bahwa setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan bersosialisasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Jika dikaitkan dengan otonomi daerah yang intinya adalah wewenang berada pada rakyat yang tinggal di daerah bersangkutan, maka pemerintah daerah dapat membuka ruang bagi seluruh komponen masyarakat untuk dapat terlibat dan berperan serta dalam seluruh proses pembangunan.

Partisipasi masyarakat menekankan pada “partisipasi” langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Gaventa

dan Valdermen (dalam Dwiningrum, 2011:54) menegaskan bahwa partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat.

Menurut Suryono (2001:124) partisipasi merupakan ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan, ikut memanfaatkan, dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Asumsi pada pakar yang berpendapat bahwa semakin tinggi kepedulian atau partisipasi masyarakat pada proses-proses perencanaan akan memberitakan output yang lebih optimal. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka makin tinggi pula tingkat keberhasilan yang akan dicapai, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan indikator utama dan menentukan keberhasilan pembangunan. Hal ini menunjukkan partisipasi masyarakat dan pembangunan berencana merupakan dua terminologi pendapat atau teori tersebut secara rasional dapat diterima, karena secara ideal. Tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu sangatlah pantas masyarakat terlibat didalamnya.

Untuk itu, setiap berbicara partisipasi masyarakat tidak dapat dilepaskan dari:

- a. Ada keterlibatan dan kontribusi aktif
- b. Secara fisik dan mental
- c. Dalam kegiatan bersama
- d. Menunaikan hak dan kewajiban

e. Mencapai tujuan yang telah ditetapkan

Oleh karena pentingnya partisipasi atau dukungan atau kontribusi atau keikut-sertaan masyarakat maka partisipasi menjadi kunci segala sesuatu, termasuk sukses atau tidaknya pelaksanaan pembangunan. Apabila partisipasi ada di mana-mana dan dilakukan oleh banyak orang maka tidak ada pekerjaan yang tidak sukses. Di sisi lain, hasil bisa lebih optimal, semua biaya menjadi lebih ringan, pekerjaan akan menjadi lebih lancar, sekaligus partisipasi dalam hal ini akan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan memiliki terhadap hasil pekerjaan. Persoalan yang muncul dalam 15 (lima belas) tahun terakhir adalah ada penurunan yang signifikan tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan. Mengapa fenomena ini terjadi dan faktor apa penyebabnya? Pertanyaan ini harus dapat dijawab oleh administrasi pembangunan karena salah satu tugas pokok dan fungsi administrasi pembangunan adalah membangun partisipasi masyarakat.

Terdapat tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat menjadi sangat penting dalam pembangunan yaitu : Partisipasi merupakan alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut.

Adanya anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat sendiri.

Gagasan tentang perlibatan peran warga dalam kegiatan masalah pembangunan terutamamelalui model warga pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan partisipasi sesungguhnya.

Menurut Soutrisno(1995) hambatan yang dihadapi dalam melakukan proses pembangunan yang partisipatif adalah belum dipahaminya makna sebenarnya dalam konsep partisipasi oleh pihak perencana dan pelaksanaan pembangunan .Defenisi partisipasi yang berlaku dikalangan aparat perencana dan pelaksana pembangunan adalah kemauan masyarakat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang dirancang ditentukan tujuan oleh pemerintah.

Sanof (2009: 9) menegaskan bahwa tujuan utama dari peran serta masyarakat adalah: Melibatkan masyarakat dalam mendesain proses pengambilan keputusan dan sebagai hasilnya, meningkatkan kepercayaan mereka, sehingga mereka dapat menerima keputusan dan menggunakan dalam sistem yang telah ada ketika mereka menghadapi suatu masalah.

Menyalurkan suara masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan guna meningkatkan (kualitas) dari perencanaan dan keputusannya.Mengingatnkan rasa kebersamaan (*sense of community*) dengan mengajak masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.

Davis (1962: 428) juga menegaskan bahwa ada tiga hal yang harus diperhatikan secara khusus mengenai partisipasi. Ketiga hal tersebut adalah:

- a. Unsur pertama adalah partisipasi, sesungguhnya merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, bukan hanya keterlibatan secara jasmaniah saja.
- b. Unsur kedua adalah kesediaan memberi sesuatu sumbangan untuk membantu tercapainya tujuan dari kelompok tersebut.
- c. Unsur ketiga adalah rasa turut bertanggung jawab atas segala sebab akibat dari kegiatan tersebut.

Beberapa catatan yang telah diungkapkan dapat ditegaskan bahwa ada beberapa hal mendasar yang perlu disikapi dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat, yang dapat dirinci sebagai berikut.

1. Dibangunnya ruang atau wahana partisipasi masyarakat
2. Penerapan pendekatan pembangunan yang partisipatif
3. Ada keteladanan pemimpin formal maupun informal, sekaligus berfungsi sebagai motivator
4. Partisipasi sebagai hak dan kewajiban yang dijadikan budaya bagi masyarakat

Segala kelebihan pendekatan partisipatif seperti yang telah diungkapkan bukan berarti dalam praktik tidak ada kendala sama sekali. Beberapa kendala terkait dengan demokratisasi. Idealnya semua pemangku kepentingan mendapat kesempatan yang sama dalam berbicara dan tidak dibeda-bedakan dari segi suku, jenis kelamin, pendidikan dan tingkat ekonomi. Persoalannya adalah orang terdidik dan kuat ekonomi lebih mendominasi, sedangkan lainnya hanya sebagai pendengar. Penulis juga masih sering menemukan bahwa bukan isi atau bobot

bicaranya yang dinilai, melainkan masih lebih melihat siapa yang bicara. Di mana-mana apabila dalam satu forum ada si kaya dan si miskin maka si miskin tidak atau jarang mau bicara. Si miskin membutuhkan wahana tersendiri, supaya mereka bisa bicara apa adanya dan apa saja yang mereka butuhkan. Sehubungan dengan pembangunan yang partisipatif, dalam implementasinya memerlukan kehadiran fasilitator yang mengorganisir dari proses awal sampai mencapai hasil seperti yang diharapkan. Selain itu, pendekatan partisipatif semakin relevan karena desa-desa di Indonesia diberikan alokasi dana desa (ADD) semakin bertambah besar pasca diberlakukan Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengelolaan ADD, khususnya yang berhubungan dengan dana pembangunan desa dapat mempergunakan pendekatan partisipatif.

Dalam hal ini peneliti lebih memfokuskan pada partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (MusernbangDes) dalam pengambilan keputusan di Desa Sekura. Dengan ikut menghadiri rapat musrenbang masyarakat dapat berpartisipasi dengan kehadiran dalam rapat, ikut terlibat dalam diskusi dengan memberikan argumen terhadap pembahasan dalam musyawarah, sumbangan pemikiran berupa ide-ide saran bagaimana perencanaan pembangunan kedepannya dan tahap pengambilan keputusan untuk pembangunan di desa, dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan yang dirasa tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat atau bukan merupakan kebutuhan penting untuk kesejahteraan masyarakat kedepannya.

2.1.3 Konsep Perencanaan Pembangunan

Secara etimologis, perencanaan berasal dari kata rencana yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Sedangkan secara empiris, perencanaan dapat diartikan sebagai salah satu fungsi manajemen yang digunakan oleh orang, unit, atau lembaga untuk mengkaji dan memecahkan suatu persoalan. Banyak ahli yang mendefinisikan perencanaan, diantaranya Adisasmita (2013:19) mengemukakan bahwa perencanaan adalah suatu proses penyiapan seperangkat keputusan yang dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu. Sedangkan pendapat Sjafrizal (2016:24) berpendapat bahwa pengertian perencanaan pembangunan yaitu cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara cepat, terarah dan efisien sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan. Perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Suatu pelaksanaan kegiatan pembangunan jika tidak didasarkan pada perencanaan, maka hasilnya akan sulit untuk bisa diukur, dan tidak jelas arah pembangunannya. Karenanya, perencanaan sangat penting dan harus dilaksanakan sebelum melaksanakan pembangunan (Solekhan, 2014:47).

Dalam perencanaan pembangunan, pemberian diskresi untuk ikut mengambil keputusan dalam merencanakan apa yang masyarakat ingin rasakan sebagai upaya menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Kepercayaan inilah yang kemudian melahirkan semangat dan rasa percaya diri masyarakat secara sadar dan penuh keikhlasan menyumbangkan pikiran, tenaga, serta ikut membantu menyukseskan program pembangunan yang mereka putuskan sendiri.

2.1.4 Konsep Pengambilan Keputusan

Dalam proses perencanaan pembangunan diperlukan sebuah tindakan dalam menentukan arah pembangunan. Pengambilan keputusan mutlak dilakukan dalam setiap perencanaan agar dapat memilih alternatif kebijakan untuk melanjutkan proses pembangunan secara keseluruhan. Pengambilan keputusan merupakan proses kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha memecahkan suatu masalah (*problem solving*) yang sedang dihadapi kemudian menetapkan berbagai macam alternatif yang dianggap paling tepat untuk dilaksanakan. Sedangkan pengambilan keputusan menurut Sasulu (2008:47) mendefinisikan pengambilan keputusan sebagai proses memilih suatu alternatif cara bertindak dengan metode efisien sesuai dengan situasi berbagai cara untuk menemukan dan menyelesaikan suatu masalah.

Di dalam pengambilan keputusan terdapat serangkaian tahap yang perlu untuk mempermudah pengambilan keputusan. Adapun tahap-tahap dalam pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh Stephen Robbins dan Mery Coulter (dalam Fahmi, 2016:5) yaitu sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi masalah
2. Mengidentifikasi kriteria keputusan
3. Memberi bobot pada kriteria
4. Mengembangkan alternatif-alternatif
5. Menganalisis alternatif
6. Memilih suatu alternatif
7. Melaksanakan alternatif tersebut

8. Mengevaluasi efektivitas keputusan

2.2. Hasil Penelitian Yang Relevan

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini yang digunakan peneliti sebagai rujukan dan sebagai referensi dalam menulis, berikut ini hasil penelitian yang dilakukan oleh:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Amanda Sicilia Nur'ana Sudirman (2019), skripsi dengan judul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sangat Tertinggal (Studi Paskonsuka Mulya Kecamatan Lampung Barat) ”**. melalui penelitian ini Amanda mendeskripsikan partisipasi dalam pemberian sumbangan pembangunan secara umum kurang optimal karena sumbangan masyarakat terhadap proses pembangunan hanya berupa tenaga dan buah pikiran dan partisipasi masyarakat masih belum optimal karena partisipasi masyarakat lebih banyak pada proses pemanfaatan hasil pembangunan saja.
2. Rahayu Sriwahyuni (2017), skripsi dengan judul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di Desa Sungai Mata-Mata Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara ”**. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis partisipasi masyarakat terhadap pembangunan fisik berupa pasar tradisional di Desa Sungai Mata-Mata Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara. Yang ditinjau dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap pembangunan pasar tradisional di Desa Sungai Mata-Mata. Berdasarkan teori Cohen dan Unhoff tentang partisipasi dalam pengambilan keputusan,

partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pemanfaatan dan partisipasi dalam evaluasi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan pasar tradisional di Desa Sungai Mata-Mata Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara yang ditinjau dari aspek pengambilan keputusan adalah rendah. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dikemudian hari, pemerintah Desa Sungai Mata-Mata lebih aktif melibatkan pedagang dalam proses pengambilan keputusan, melalui sosialisasi secara keseluruhan, serta mengenyampingkan kepentingan pribadi dan golongan dalam melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pedagang harus bersifat lebih aktif dalam menyerap informasi pembangunan, serta harus merubah sikap yang cenderung diam dan pasrah terhadap permasalahan dalam pengambilan keputusan.

3. Rosnela Ginting (2012), skripsi dengan judul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Sarolangun”**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di Kabupaten Sarolangun, mulai dari musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, forum gabungan SKPD dan musrenbang kabupaten dilihat dari aspek voice dan acces merupakan partisipasi parsial luas. Dilihat dari karakteristik terjadinya partisipasi, partisipasi masyarakat yang terjadi dalam musrenbang di Kabupaten Sarolangun adalah partisipasi semu. Jika dilihat dari berbagai tingkatan musrenbang menunjukkan bahwa partisipasi

masyarakat dalam musrenbang desa/kelurahan merupakan partisipasi inisiatif, dimana masyarakat sudah terlibat dalam menentukan dan merencanakan usulan yang akan dilaksanakan di desa/kelurahan. Partisipasi masyarakat dalam musrenbang kecamatan merupakan partisipasi hampa, tanpa makna (*blind participation*) dimana masyarakat dalam berpartisipasi tidak tahu mengenai apa-apa yang mereka bisa usulkan, dan berapa anggaran yang disediakan. Sedangkan dalam forum gabungan SKPD dan musrenbang Kabupaten merupakan partisipasi konsultatif, dimana masyarakat mempunyai hak untuk didengar pendapatnya, dan untuk diberitahu, dimana keputusan akhir tetap berada ditangan pejabat pembuat keputusan tersebut.

4. Hariudin 2015. skripsi dengan judul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Program Alokasi Dana Desa di Desa Sejahtera Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan program alokasi dana desa meliputi dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan di Desa Sejahtera Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan dalam perencanaan tidak adanya keterlibatan masyarakat secara langsung, terutama dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Dalam musyawarah tersebut hanya dihadiri oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat. Sedangkan dalam tahap pelaksanaan juga tidak ada melibatkan masyarakat sekitar, hampir semua pelaksanaan pembangunan

dikerjakan dengan menggunakan tenaga ahli atau disebut dengan tenaga tukang. Selain itu pembangunan yang dilakukan rata-rata pembangunan yang bersifat fisik, sedangkan untuk pemberdayaan masyarakatnya kurang. Bentuk tahapan partisipasi masyarakat tersebut perlu diperhatikan dan dijalankan agar pembangunan desa dapat berjalan dengan baik.

2.3. Kerangka Pikir Penelitian

Pembangunan adalah perubahan sosial pada masyarakat secara partisipatif. Partisipasi masyarakat pada hakikatnya adalah keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam suatu proses pencapaian tujuan yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Penulis berpendapat bahwa pembangunan yang baik merupakan pembangunan yang berlandaskan pada perencanaan dan partisipasi masyarakat. Namun yang menjadi kendala dalam musyawarah pengambilan keputusan perencanaan pembangunan di lingkungan Desa Sekura sangat minim. Keterlibatan dan partisipasi masyarakatnya harus diperhatikan lagi. Secara khusus, hal apa yang menyebabkan rendahnya partisipasi dan bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat tersebut. Karena partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam penetapan pengambilan keputusan perencanaan pembangunan yang nantinya akan dibangun. Untuk pengkajian partisipasi masyarakat dalam musyawarah pengambilan keputusan perencanaan pembangunan di Desa Sekura penulis menggunakan teori bentuk partisipasi masyarakat oleh Cohen dan Uphoff (dalam Dwiningrum, 2011:61-62), yaitu:

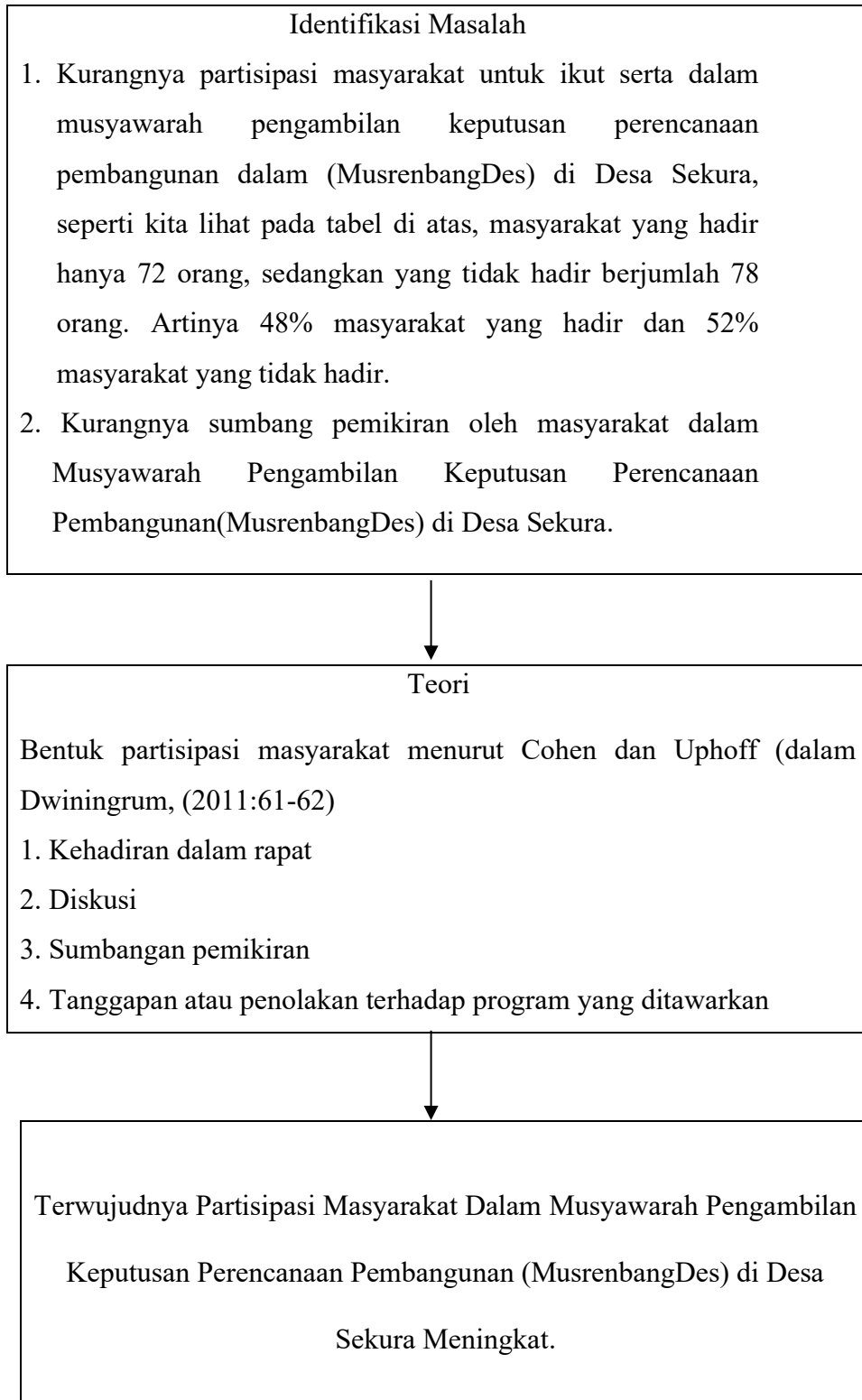
1. Partisipasi dan pengambilan keputusan.
2. Partisipasi dan pelaksanaan.

3. Partisipasi dalam pemanfaatan.

4. Partisipasi dalam evaluasi.

Berdasarkan bentuk partisipasi masyarakat oleh Cohen dan Uphoff (dalam Dwiningrum: 2011:61), peneliti memfokuskan pada partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah partisipasi pada tahap ini merupakan penentuan alternatif masyarakat untuk menuju sepakat dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Masyarakat berpartisipasi dengan:

1. Kehadiran dalam rapat, yaitu ketersediaan masyarakat untuk datang menghadiri rapat atau musyawarah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.
2. Diskusi, yang dimaksud oleh peneliti adalah bagaimana masyarakat dalam forum rapat tersebut ikut menyalurkan pendapat dan membahasnya bersama para pemimpin desa untuk tercapainya keinginan masyarakat untuk desa Sekura. Dengan bersama-sama membahas rencana pemerintah dan keinginan masyarakat.
3. Sumbangan pikiran, yakni ide-ide atau saran apa yang diinginkan masyarakat untuk desa dan untuk kepentingan di desa Sekura.
4. Tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan, yaitu masyarakat diharapkan lebih aktif lagi menanggapi program-program perencanaan pembangunan yang ditawarkan tidak hanya pasrah terhadap keputusan-keputusan pemerintah desa saja.

TABEL 2.1**Kerangka Pemikiran**

2.4. Pertanyaan Peneliti

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah penulis jelaskan sebelumnya, maka penulis menyimpulkan pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana partisipasi kehadiran masyarakat dalam rapat musyawarah pengambilan keputusan perencanaan pembangunan dalam MusrenbangDes di Desa Sekura ?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam diskusi pengambilan keputusan perencanaan pembangunan dalam MusrenbangDes di Desa Sekura ?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat menyalurkan pendapat dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan MusrenbangDes di Desa Sekura ?
4. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam memberi tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan dalam MusrenbangDes di Desa Sekura ?